

Report title: BAB I PENDAHULUAN
Report ID: 919aae028b16ab9b6620
Date: 09/23/2019
Score: 14%

#1

60% similar

"Latar Belakang Masalah Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan juga dilakukan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, demikian yang tercantum dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman"

<http://www.pa-blitar.go.id/informasi-pengadilan/166-upaya-intervensi-di-pengadilan-agama-hakim-wajib-mengisi-kekosongan-hukum-materiil-maupun-hukum-formil.html>

...n Kehakiman menyatakan : Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai **hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan dalam Bab IX pasal 24 ayat (2) bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Peradilan agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia sesuai dengan ketentuan** pasal 10 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 yang telah diubah dengan UU No.35 Tahun 1999 dan terakhir diu...

#2

69% similar

"Peradilan umum, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama."

<https://media.neliti.com/media/publications/163261-ID-kewenangan-pengadilan-negeri-dan-pengadi.pdf>

...pengadilan tersebut, telah berkembang baik di lingkungan Pengadilan Negeri maupun dalam lingkungan **Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam. 2 Pasal 50 UU No 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.** Pengertian tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya, semua perkara pidana dan perdata menjadi kewena...

#3

100% similar (exact match)

"Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara"

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57f2f9bce942f/perbedaan-pokok-hukum-pidana-dan-hukum-perdata>

...insip-prinsip Hukum Pidana, memberikan definisi hukum pidana sebagai berikut: **Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara** yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tida...

#4

91% similar

"Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana"

<https://media.neliti.com/media/publications/37183-ID-perumusan-ketentuan-pidana-dalam-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia.pdf>

...lam Dies Natalis Universitas Gadjah Mada tahun 1955, hal. 9 mengatakan : ?
perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melanggar larangan tersebut, dinamakan perbuatan pidana?....

#5

93% similar

"Sedangkan Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dalam masyarakat"

https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_perdata

...AB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA First page of the 1804 original edition of the Napoleonic code **Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dalam masyarakat.** Tradisi hukum di daratan Eropa (civil law) mengenal pembagian hukum menjadi dua yakni hukum publi...

#6

80% similar

"Di Indonesia hukum perdata pada dasarnya bersumber pada Belanada diatur dalam Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang burgerlijk wetboek voor Indonesia (disingkat BW) atau disebut sebagai KUH Perdata"

https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Perdata

...Hukum perdata **di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon kemudian berdasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang burgerlijk wetboek voor Indonesie (disingkat BW) atau disebut**

sebagai KUH Perdata. BW sebenarnya merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujuka...

#7

74% similar

"Namun kemudian diberlakukan juga oleh pemerintah Hindia Belanda berlaku bagi warga negara Indonesia"

https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Perdata

...oa, dan timur asing. Namun, berdasarkan kepada pasal 2 aturan peralihan Undang-undang Dasar 1945, **seluruh peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda berlaku bagi warga negara Indonesia** (asas konkordasi). Beberapa ketentuan yang terdapat di dalam BW pada saat ini telah diatur secara...

#8

76% similar

"Terhadap kekuasaan absolut ini, sebuah Pengadilan diharuskan untuk meneliti perkara yang diajukan kepadanya apakah termasuk kekuasaan absolutnya atau bukan, jika jelas-jelas tidak termasuk kekuasaan absolutnya sebuah pengadilan dilarang menerimanya"

<https://media.neliti.com/media/publications/58439-ID-analisis-terhadap-uu-no-3-tahun-2006-dan.pdf>

...ng telah ditetapkan menjadi ke wenangan suatu badan peradilan secara mutlak menjadi kewenangannya **untuk memeriksa dan memutus perkara.** **Namun Pengadilan Agama diharuskan untuk meneliti perkara yang diajukan kepadanya apakah termasuk kekuasaan absolutnya atau bukan. Kalau tidak termasuk kekuasaan absolutnya, Pengadilan Agama dilarang menerimanya.** Jika Pengadilan Agama menerimanya, maka pihak tergugat dapat mengajukan keberatan yang disebut deng...

#9

96% similar

"Kewarisan wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum islam; 3"

<https://media.neliti.com/media/publications/90450-ID-penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah-di.pdf>

...ara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a) perkawinan, b) **kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam**, dan c) wakaf dan shadaqah. Dengan adanya amendemen Undang-Undang...

#10

95% similar

"ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan atau yang berlaku"

http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_7_89.htm

...c. wakaf dan shadaqah. (2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a **ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku**. (3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-si...

#11

100% similar (exact match)

"(3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut"

...a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku. **(3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.** Pasal 50 Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara...

#12

76% similar

"Pasal 50 Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49 maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkup peradilan umum"

<http://www.pa-blitar.go.id/informasi-pengadilan/166-upaya-intervensi-di-pengadilan-agama-hakim-wajib-mengisi-kekosongan-hukum-materiil-maupun-hukum-formil.html>

...an bahwa yurisdiksi Pengadilan Agama yaitu tidak meliputi Sengketa milik sebagaimana tersebut dalam **Pasal 50 UU nomor 7 tahun 1989, yaitu dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan** dalam lingkungan Peradilan Umum. Berarti dalam perkara harta warisan, wasiat, hibah, wakaf d...

#13

68% similar

"pada pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan

Agama, semakin memperkuat kedudukan peradilan agama itu sendiri"

<http://www.pa-blitar.go.id/informasi-pengadilan/166-upaya-intervensi-di-pengadilan-agama-hakim-wajib-mengisi-kekosongan-hukum-materiil-maupun-hukum-formil.html>

...dang-undang ini. Jika Pasal di atas dihubungkan dengan kekuasaan pengadilan agama yang tercantum dalam **Pasal 49 Undang-undang 03 tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama mengatakan : Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di...**

#14

99% similar

"Di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 antara lain diatur tentang pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah"

<https://media.neliti.com/media/publications/90450-ID-penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah-di.pdf>

...rkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat. Perluasan tersebut meliputi bidang ekonomi syariah. **Di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 antara lain diatur tentang pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah.** Prinsip syari'ah yang dimaksud adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara pihak bank dan...

#15

95% similar

"Maksud adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara pihak bank dan pihak nasabah untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lain, yang dinyatakan sesuai dengan

syari'ah"

<https://media.neliti.com/media/publications/90450-ID-penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah-di.pdf>

...ahun 1998 antara lain diaturtentang pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah. Prinsip syari'ah yang dimaksud adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara pihak bank dan pihak untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lain, yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah antara lain mudharabah, musyarakah dan murabahah.² Berdasarkan Undang-undang Perbankan, masyarakat di...

#16

94% similar

" Dari penjelasan pasal 49 huruf (i) tersebut, maka seluruh nasabah lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah, atau bank konvensional yang membuka unit syariah dengan sendirinya terikat dengan ketentuan ekonomi syariah, baik dalam pelaksanaan akad maupun dalam penyelesaian perselisihan"

<https://media.neliti.com/media/publications/90450-ID-penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah-di.pdf>

...a hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai ketentuan pasal ini. **Dari penjelasan Pasal 49 tersebut, maka seluruh nasabah lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah, atau bank konvensional yang membuka unit usaha syariah dengan sendirinya terikat dengan ketentuan ekonomi syariah, baik dalam pelaksanaan akad maupun dalam penyelesaian perselisihan.** Adapun sengketa di bidangnya ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah: 15a. Sengk...

#17

60% similar

"Dari permasalahan dalam sengketa ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam pasal 49 huruf (l) tersebut adalah :
a"

<https://media.neliti.com/media/publications/90450-ID-penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah-di.pdf>

...syariah dengan sendirinyaterikat dengan ketentuan ekonomi syariah, baik dalam pelaksanaan akad maupun **dalam penyelesaian perselisihan. Adapun sengketa di bidangekonomi syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah:15a. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya; 14 Suhartono, Prospek Legisla...**

#18

88% similar

"Permasalahan bidang ekonomi syariah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah; c"

<https://media.neliti.com/media/publications/90450-ID-penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah-di.pdf>

...Banten, 2011, hlm.8 Erie Hariyanto al-lhk?m, V o l . 1 N o . 1 J u n i 2 0 1 4 5 2 Iqtishadia b. **Sengketa di bidang ekonomi syariah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah;c**. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjan...

#19

88% similar

"Permasalahan di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjian disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip

<https://media.neliti.com/media/publications/90450-ID-penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah-di.pdf>

...0 1 452 Iqtishadia b. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga **pembiayaan syariah**;c. **Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebut dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah**. Selain dalam hal kewenangan sebagaimana diuraikan di atas, Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 juga mengatur...

#20

69% similar

"Kegunaan teoritis, sebagai sarana media agar dapat memperluas cakrawala pemikiran khasanah keilmuan khususnya tentang perbuatan melawan hukum syariah di masa yang akan datang. 2"

<http://digilib.uinsby.ac.id/1307/4/Bab%201.pdf>

.../Pdt.G/2013/PA.Mlg tentang penolakan hakim atas pembagian gaji PNS. F. Kegunaan Hasil Penelitian 1. **Kegunaan Teoritis Sebagai sarana media agar dapat memperluas cakrawala pemikiran dan khasanah keilmuan khususnya yang berkaitan dengan pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil atas istri pasca perceraian, yang** relevansinya bisa terjadi di masa yang akan datang. 2. Kegunaan Praktis 10 Sebagai bahan pertimbangan...

#21

95% similar

"Begitu juga dengan penelitian-penelitian yang telah ditulis terdahulu, dalam penelusuran sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang sama, sehingga kemungkinan adanya pengulangan atau duplikasi tidak akan terjadi. G. Landasan Teori . 1"

...gaji PNS ataupun bisa juga di sebut dengan nafkah seorang istri dari suami PNS yang sudah di cerai. **Begitu juga dengan penelitian-penelitian yang telah ditulis terdahulu, dalam penelusuran sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang sama, sehingga kemungkinan adanya pengulangan atau duplikasi tidak akan terjadi.** E. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim menolak pembagian gaji PNS pasca perceraian. 2....

#22

61% similar

"Kemudian mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama"

<https://media.neliti.com/media/publications/58439-ID-analisis-terhadap-uu-no-3-tahun-2006-dan.pdf>

...tang Mahkamah Agung dan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, **Undang-undang tentang Peradilan Agama ini juga telah mengalami perubahan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah dirubah dan di tambah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,** kemudian diamandemen lagi dengan lahirnya UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua...

#23

80% similar

"Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a) Perkawinan, b) Waris, c) Wasiat, d) Hibah, e) Wakaf, f), Zakat, g), Infaq, h) Shadaqah, dan i), Ekonomi Syariah."

<http://www.pa-palu.go.id/profile-pengadilan/fungsi-dan-tugas-pengadilan>

...ama pada umumnya, yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang perubahan **atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 49** menyatakan, "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:a) Perkawinanb) Warisc) Wasiatd) Hibahe) Waqaff) Zakatg) Infakh) Sedekahi) Ekonomi Syari'ah.Dalam penjelasan Undang-Undang ini pada alinea II disebutkan para pihak sebelum berperkara dapat memp...

#24

72% similar

"Dana pensiun lembaga keuangan Syariah dan k. Bisnis Syariah"

<https://media.neliti.com/media/publications/90450-ID-penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah-di.pdf>

...harga berjangka menengahsyariah, Sekuritas Syariah, Pegadaian syariah, **Dana Pensiun LembagaKeuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro-Syariah**4Kewenangan mengadili lingkungan Peradilan Agama dalambidang ekonomi sya...

#25

84% similar

"lembaga mikro syariah dimaksud adalah lembaga badan usaha yang kekayaan utama berbentuk aset keuangan, memberikan kredit dan menanamkan dananya dalam surat berharga, serta menawarkan jasa keuangan lain seperti simpanan, asuransi, investasi, pembiayaan, dan lain-

lain"

http://eprints.walisongo.ac.id/1322/3/072411065_Bab2.pdf

...uangan Mikro Institusi Kinerja dan Sustainabilitas, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2008, hlm. 23. 16 c. **Lembaga Keuangan Syaria?ah Lembaga Keuangan Syariah** adalah badan usaha yang kekayaan utamanya berbentuk aset keuangan, memberikan kredit dan menanamkan dananya dalamsurat berharga. Serta menawarkan jasa keuangan lain seperti: **simpanan, asuransi, investasi, pembiayaan, dll**. Berdasarkan prinsip syariah dan tidak menyalahi dewansyariah nasional.⁴ Untuk menyesuaikan dengan a...

#26

56% similar

"Termasuk didalamnya Koperasi Syariah termasuk seluk beluk di dalamnya merupakan satu bagian dari ekonomi syariah yang menjadi kewenangan absolut pengadilan agama"

<https://media.neliti.com/media/publications/90450-ID-penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah-di.pdf>

...usaha syariah dengan sendirinyaterikat dengan ketentuan ekonomi syariah, baik dalam pelaksanaan akad**maupun dalam penyelesaian perselisihan. Adapun sengketa di bidangekonomi syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama** adalah:15a. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangandan lembaga pembiayaan syariah...

#27

72% similar

"Ditambahkan juga dalam penjelasan pasal 49 huruf i tersebut yang dimaksud dengan “ekonomi syariah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip Syariah"

...yariah;sektor ekonomi syariah yang lebih luas lagi dari pada zakat dan infaqdan keempat Perkara Penetapan Pengangkatan Anak berdasarkan Hukum Islam.3 Adapun yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip 2 Mohammad Daud Ali, Lembaga-lembaga Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo,1995), hlm 119.3 Ibid, hl...

#28

75% similar

"Pendekatan Masalah Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 1) Pendekatan perundang-undangan (state approach), penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian"

<http://digilib.unila.ac.id/16549/13/BAB%20III.pdf>

...ytical approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan filsafat (philosophical approach) dan pendekatan kasus (case approach). 31 Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Untuk itu Peneliti harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai b...

#29

56% similar

"2) Pendekatan Kasus (case approach), adalah pendekatan yang didasarkan pada putusan-putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap"

...dap tergugat sebagaimana diatur pada oleh Pasal 116 Undang-Undang Tentang Peradilan TUN, ditenggarai **menjadi salah satu faktor diantara banyak faktor lain yang menyebabkan tergugat tidak mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap** tersebut. Berdasarkan latar belakang sengketa kepegawaian tersebut, penulis merasa tertarik untuk me...

#30

100% similar (exact match)

"Publikasi-publikasi hukum banyak mengandung doktrin-doktrin hukum yang berguna dalam tataran akademik maupun praksis hukum"

<https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/IQT/article/download/2143/1744>

...hukum berupa publikasi-publikasi mengenai hukum yang tidak termasuk dalam dokumen resmi Negara 2 . **Publikasi-publikasi hukum banyak mengandung doktrin-doktrin hukum yang berguna dalam tataran akademik maupun praksis hukum.** Bahan hukum primer penelitian ini adalah perundang-undangan dan putusan Pengadilan yang relevan den...

#31

64% similar

"Keseluruhan bahan hukum yang diperoleh tersebut akan dianalisa melalui pembacaan dan penelaahan bahan hukum secara sistemik, yaitu membaca bahan hukum secara keseluruhan dan mempertimbangkannya satu sama lain. 6"

<https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/IQT/article/download/2143/1744>

..., buku-buku, jurnal, dan publikasi ilmiah lain yang membahas mengenai asas

kebebasan berkontrak dan **keseimbangan kedudukan para pihak dalam perjanjian (asas keadilan)**. Keseluruhan data yang diperoleh tersebut akan dianalisis melalui pembacaan dan penelaahaan data secara sistemik, yaitu membaca data secara keseluruhan dan **memperbandingkannya satu sama lain**. 2.5. Analisis data Analisis terhadap data-data yang diperoleh dalam penelitian ini bersifat preskipt...

#32

57% similar

"Dan Penyelesaian sengketa ekonomi syariah termasuk didalamnya ratio legis lahirnya keberadaan pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang pasal dan isinya tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama"

<https://media.neliti.com/media/publications/163261-ID-kewenangan-pengadilan-negeri-dan-pengadi.pdf>

...al-usuk anak dan 8 Masrukhin, Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Mungkid, (Mungkid: 11 Januari 2017). **penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam?. Pengadilan Agama telah berwenang mengesahkan pengangkatan anak antar orang yang beragama Islam yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama**. Hukum keluarga dalam arti luas meliputi hukum perkawinan dan hukum kewarisan. Hukum perkawinan di l...